

## PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN CIANJUR TAHUN 2019)

### THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND PARTICIPATION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT (A CASE STUDY AT VILLAGE GOVERNMENT CIANJUR SUB-DISTRICT IN 2019)

Risca Syafira Angelia<sup>1</sup>, Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA<sup>2</sup>

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>[riscasyafira20@gmail.com](mailto:riscasyafira20@gmail.com) <sup>2</sup>[srirahayu@telkomuniversity.ac.id](mailto:srirahayu@telkomuniversity.ac.id)

#### Abstrak

Besarnya anggaran desa yang diberikan pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan desa. Namun disamping besarnya dana desa yang diberikan, dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan permasalahan, sehingga pemerataan pembangunan desa tidak akan terlaksana dengan baik dan dapat menimbulkan penyimpangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019 baik secara simultan maupun secara parsial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian dekriptif dan bersifat kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling* jenuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019. Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masing-masing secara parsial berpengaruh dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.

**Kata kunci:** *Transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pengelolaan keuangan desa.*

#### Abstract

The amount of the village budget given by the government is expected to be able to realize equitable village development. However, aside from the large amount of village funds given, implementation often creates problems, so that the equitable distribution of village development will not be carried out properly and can lead to irregularities.

This research was conducted to determine the effect of transparency, accountability and participation on village financial management in the Village Government of Cianjur sub-district in 2019 both simultaneously and partially. The method used in this study uses multiple linear regression techniques. This research belongs to the type of descriptive research and causality. The population in this study is the Village Government of Cianjur sub-district. The sampling technique uses saturated sampling.

The results showed that simultaneous transparency, accountability and participation affected village financial management in Cianjur sub-district Government in 2019. Partially, transparency has no effect on village financial management at Village Government of Cianjur sub-district in 2019, while accountability and participation partially respectively influential with a positive direction on village financial management at Village Government of Cianjur sub-district in 2019.

**Keywords:** *Transparency, accountability, participation and village financial management*

### 1. Pendahuluan

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa

dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah<sup>[9]</sup>.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa dituntut untuk bisa mengurus tata pemerintahannya secara mandiri dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa<sup>[3]</sup>. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat kepada desa adalah sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat sebesar Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat sebesar Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta<sup>[7]</sup>. selanjutnya Kementerian Dalam Negeri menyebutkan dana desa yang diberikan di tahun 2018 sebesar 60 triliun dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 70 triliun<sup>[2]</sup>.

Disamping besarnya dana desa yang dikelola dan memiliki harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, terdapat juga kekhawatiran yang tak kalah besarnya, seperti ketidaksiapan SDM akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan, potensi finansial dana desa yang besar, jika tidak disertai transparansi maka dapat berpotensi terjadi penyimpangan<sup>[17]</sup>. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan mencatat jumlah kepala desa yang menjadi tersangka terkait dengan kasus korupsi meningkat setiap tahunnya, selain itu korupsi yang menjerat kepala desa masuk dalam lima besar pelaku korupsi selain ASN, kepala daerah, swasta dan DPR/DPRD<sup>[5]</sup>. Ada empat faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara baik, yakni berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik. Keempat faktor tersebut dibagi ke dalam dua dimensi, yang pertama adalah dimensi sistem yang terdiri atas 1) regulasi yang lengkap dan jelas dan 2) pengawasan yang efektif dan menyeluruh, dan yang kedua dimensi SDM yang terdiri atas 3) kompetensi kepala desa beserta perangkat desa dan 4) kompetensi pendamping desa<sup>[1]</sup>.

Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi pengelolaan keuangan desa seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nafidah & Nur, 2017), (Umami & Nurodin, 2017), (Astuti & Yulianto, 2016), (Siregar & BZ, 2017), (Putra & Rasmini, 2019), beberapa faktor tersebut antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, efektif dan efisiensi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa baik secara simultan maupun parsial. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 23.

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### 2.1 Dasar Teori

#### A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency theory* menunjukkan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) adalah perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (prinsipal) dan manajer (agen) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut,<sup>[12]</sup>.

#### B. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa<sup>[11]</sup>.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,<sup>[4]</sup>. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa,<sup>[4]</sup>, yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedua atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ Perubahan APBDesa.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

H1: Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

#### C. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam

memperoleh informasi tersebut<sup>[15]</sup>. *Agency theory* berkaitan dengan transparansi karena dalam teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi, yaitu keadaan dimana principal tidak memperoleh informasi yang sama dengan agen, sehingga dengan adanya transparansi yang tinggi, principal dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapannya dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari<sup>[13]</sup>.

Transparansi meliputi lima hal sebagai berikut<sup>[6]</sup>:

1. Keterbukaan dalam rapat-rapat peting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya
2. Keterbukaan informasi yang hubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat
3. Keterbukaan prosedur
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Dengan adanya transparansi akan terciptanya akses kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil-hasil yang dicapai, adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pun akan memudahkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa karena pengelolaan keuangan tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal ini dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa karena pengelolaan keuangan desa bisa menjadi sangat sensitif di kalangan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) dan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

H2: Transparansi berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa

#### **D. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>[9]</sup>. *Agency theory* berkaitan dengan variabel akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari agen (aparatur desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada principal (masyarakat desa)<sup>[13]</sup>.

Macam-macam akuntabilitas publik, yaitu<sup>[8]</sup>:

1. Pertanggungjawaban Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

2. Pertanggungjawaban Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

Dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses penggunaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa, yang tentunya hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa dan diharapkan dengan adanya akuntabilitas, pemerintah dapat terus memperbaiki kualitas kinerja pemerintah dan terhindar dari penyimpangan karena nantinya hasil tersebut harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Umami & Nurodin, 2017) dan (Nurlinda, 2018) menyatakan terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

H3: Akuntabilitas berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.

#### **E. Pengaruh Partisipasi terhadap pengelolaan Keuangan Desa**

Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah<sup>[10]</sup>. *Agency theory* berkaitan dengan partisipasi karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian principal pada kinerja agen<sup>[13]</sup>.

Berikut adalah pentingnya partisipasi<sup>[16]</sup>:

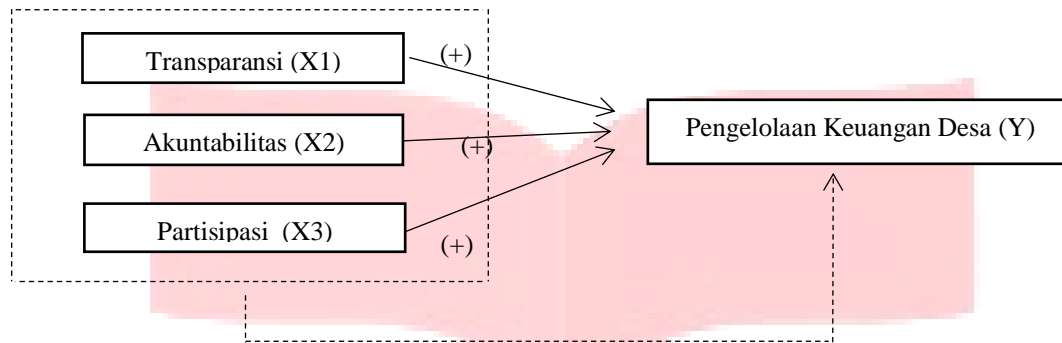
1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan apabila keberadaannya dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan;
3. Partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik pula dan akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah yang dalam hal ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan

tugasnya karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi juga merupakan sarana bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Indriani, et.al:2019) bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

H4: Partisipasi berpengaruh positif secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa



Keterangan :

- 1. Garis bersambung —————> : Parsial
- 2. Garis putus-putus - - - - -> : Simultan

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

**2.2 Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur. Dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan metode sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 TA + \beta_2 AK + \beta_3 PA + e \tag{2.1}$$

Keterangan:

- Y = Pengelolaan Keuangan Desa
- $\alpha$  = Konstanta
- TA = Transparansi
- AK = Akuntabilitas
- PA = Partisipasi
- $b_1, b_2, b_3$  = Koefisien Regresi
- e = *Epsilon* atau *error term*

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 3.1**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	10.287	6.223
Transparansi	.329	.212
Akuntabilitas	.355	.131
Partisipasi	.258	.074

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tabel 3.1 di atas maka didapatkan nilai konstanta sebesar 10,287 dan nilai koefisien regresi  $b_1$  0,329, nilai  $b_2$  0,355, nilai  $b_3$  0,258, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 10,287 + 0,329 TA + 0,355 AK + 0,258 PA$$

Keterangan:

Y	= Pengelolaan Keuangan Desa
$\alpha$	= Konstanta
TA	= Transparansi
AK	= Akuntabilitas
PA	= Partisipasi
$b_1, b_2, b_3$	= Koefisien Regresi
e	= Epsilon atau <i>error</i> term

#### 3.2 Uji Simultan (F)

**Tabel 3.2**  
**Hasil Uji Simultan**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	488.898	3	162.966	15.705	.000 <sup>b</sup>
	Residual	529.211	51	10.377		
	Total	1018.109	54			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

*Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 23 (2019)*

Pada tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 yang berarti profitabilitas signifikansi dalam penelitian ini adalah sebesar  $< 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut berarti bahwa transparansi (X1), akuntabilitas (X2) dan partisipasi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

### 3.3 Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 3.3**  
**Hasil Uji Parsial**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.287	6.223		1.653	.104
Transparansi	.329	.212	.192	1.554	.126
Akuntabilitas	.355	.131	.303	2.718	.009
Partisipasi	.258	.074	.406	3.509	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

*Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 23 (2019)*

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada setiap variabel memiliki hasil yang berbeda-beda. Pada variabel transparansi (X1) didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,126 sehingga signifikansi  $> 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel transparansi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

Pada variabel akuntabilitas (X2) didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,009 sehingga signifikansi  $< 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh signifikan kearah positif terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

Pada variabel partisipasi (X3) didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,005 sehingga signifikansi  $< 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya variabel partisipasi (X3) berpengaruh signifikan kearah positif terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

### 3.4 Uji Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ )

**Tabel 3.4**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ )**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 <sup>a</sup>	.480	.450	3.221

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

*Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 23 (2019)*

Pada tabel 3.4 diatas, hasil menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,450 atau 45%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam mempengaruhi variabel pengelolaan keuangan desa mencapai 45%. Sedangkan sisanya sebesar 0,55 atau 55% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

## 4. Kesimpulan

### 1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh bahwa:

Secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dilaksanakan maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur.

### 2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh bahwa:

- Transparansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.
- Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.
- Partisipasi secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.

**Daftar Pustaka**

- [1] A. M., Prasetyo, A. G., Suropto, D. O., D. C., S. A., . . . Ariawan, Y. D. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014*. Jakarta: Pusat Inovasi Tata Pemerintahan.
- [2] Arfin, Y. (2019, November 08). *Jumlah Desa Naik, Kemendes Pantau Pemanfaatan Dana Desa*. [Online]. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4777665/jumlah-des-naik-kemendes-pantau-pemanfaatan-penggunaan-dana-des>. [10 Desember 2019]
- [3] BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. [online]. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2451/Juklak-Bimkon-Kuangan-Desa.bpkp>. [20 Agustus 2019]
- [4] BPKP. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. [Online]. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id>. [08 Januari 2020]
- [5] Budhiman, I. (2019, November 08). *Dana Desa Mengucur Deras, Jumlah Kepala Desa Terjerat Korupsi Meningkat*. [Online]. Retrieved from <http://m.bisnis.com/amp/read/20191108/16/1168414/dana-des-mengucur-deras-jumlah-kepala-des-terjerat-korupsi-meningkat>. [09 Desember 2019]
- [6] K. N., Atmadja, A. T., & Julianto, I. P. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutrain Pada Dadia Tangkas Kori Agung Pakraman Bila Bajang Kecamatan Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- [7] Kemenkeu. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. [online]. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/buku-pintar-dana-des> [22 September 2019]
- [8] Mardiasmo, P. D. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- [9] Pemerintah, R. I. (2014). *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [10] Pemerintah, R. I. (2017). *Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [11] Pemerintah, R. I. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [12] Praba Dewi, N. A., & Gayatri. (2019). Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Univeristas Udayana Vol. 26*, 1269-1298.
- [13] Putra, I. Y., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Vol.28.1*, 132-158.
- [14] Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM Volume. 2, No. 1*, 52-66.
- [15] Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi Vol. 6 Edisi 11*, 74-80.
- [16] Utari, N. D., & Sujana, I. (2019). Implementasi Budaya THK dalam Pengaruh Komitmen OPD dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *e-Jurnal Akuntansi*, 1715-1731.
- [17] Utomo, Kabul Setio; , Sudarmo; Suharto, Didik. G;. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 2580-3875.